



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2020
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2021**

**MATRIKS PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.1.1-

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

PN/PP/KP/Prop	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	TARGET	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
01 PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	01 - Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	01 - Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional		14,50 Persen	74 246 214,9		
		02 - Skor Pola Pangan Harapan		91,60 Nilai			
		03 - Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan		11 Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)			
	02 - Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	01 - Rasio Kewirausahaan Nasional					3,65 Persen
		02 - Pertumbuhan PDB Pertanian					3,32-3,88 Persen
		03 - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan					4,68-5,46 Persen
		04 - Kontribusi PDB Industri Pengolahan					19,63-19,84 Persen
		05 - Nilai Devisa Pariwisata					US\$4,80-8,50 Miliar
		06 - Kontribusi PDB Pariwisata					4,20 Persen
		07 - Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun					2,30-2,90 Juta Orang
		08 - Pertumbuhan Investasi (PMTI)					6,40 Persen
01.01 PP : Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01 - Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	09 - Pertumbuhan Ekspor Industri Pengolahan		8,07 Persen			
		10 - Pertumbuhan Ekspor Ril Barang dan Jasa		3,50-5,10 Persen			
		11 - Rasio Perpajakan terhadap PDB		8,18 Persen			
01.01.01 KP : Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Meningkatkan akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	01 - Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Kumulatif)	2	11,98 Giga Watt	653.957,7		
		02 - Pemanfaatan biofuel untuk domestik	2	10,20 Juta Kiloliter			
01 01 01.01 Prop Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Terlaksananya percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan	01 - Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT	2	1.001,1 MW	631 970,3		
		02 - Kapasitas terpasang tambahan PLTA	2	440,3 MW	631 970,3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
		02 - Kapasitas terpasang tambahan PLT Panas Bumi	2	80 MW			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.1.2-

PM/PP/KP/Prop	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Rencana Presiden	TARGET	Alokasi (Rp. Juta)	Institusi Pelaksana
01.01.02 KP : Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati	01 - Meningkatkan pasokan bahan bakar nabati	03 - Kapasitas terpasang tambahan PLT Bioenergi	2	152 MW		
		04 - Kapasitas terpasang tambahan PLTS	2	328,8 MW		
		01 - Jumlah pemanfaatan biofuel untuk domestik	2	10,2 Juta KL	7 890,0	
01.01.02.01 Prop : Akselerasi Pengembangan BBN	01 - Teriaksananya akselerasi pengembangan BBN	02 - Persentase mandatori pencampuran BBN ke dalam bahan bakar fosil	2	B30 Persen	7 890,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian
		01.01.04 KP : Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	2	01 - Alokasi batubara untuk kepentingan dalam negeri (DMO) yang direncanakan	168 Juta Ton	5 219,5
	02 - Persentase pemanfaatan gas bumi domestik	2		65 Persen		
01.01.04.01 Prop : Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Industri	01 - Teriaksananya pemenuhan energi yang kompetitif	01 - Jumlah laporan pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri	2	1 Laporan	5 219,5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		01.01.05 KP : Pengembangan Industri Pendukung EBT	2	01 - TKDN sektor pembangkit EBT	44 Persen	1 730,3
01.01.05.01 Prop : Pengembangan Industri EBT	01 - Teriaksananya pengembangan industri pendukung EBT	01 - TKDN Sektor EBT dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional		2	55,45 Indeks Skala 100	1.730,3
		01.01.03 KP : Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	2	01 - Intensitas energi primer	138 SBM/Rp Miliar	7 147,6
	02 - Penurunan intensitas energi final	2		0,9 SBM/Rp Miliar		
01.01.03.01 Prop : Perluasan Penerapan Efisiensi Energi	01 - Teriaksananya perluasan penerapan efisiensi energi	01 - Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	2	100 Persen	7 147,6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		01.02 PP : Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	5	01 - Produktivitas air (<i>water productivity</i>)	3,30 m ³ /kg	29.285.586,8
01.02.01 KP : Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01 - Meningkatkan pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	01 - Luas minimal kawasan berfungsi lindung (kumulatif)		5	65 Juta Ha	343 917,0
		01 - Teriaksananya inventarisasi jasa lingkungan tinggi	5	7 Ekoregion	52.112,2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.1.3-

PM/PP/KP/Prop	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah-an Presiden	TARGET	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.02.01.02 Prop. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	01 - Teriaksananya perlindungan dan pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara partisipatif	01 - Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi	5	1.500 Desa	291.804,8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01.02.02 KP : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01 - Meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan	01 - Luas kawasan hutan produksi	2	34,1 Juta Ha	194.618,2	
01.02.02.01 Prop. Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	01 - Teriaksananya optimalisasi hasil hutan dan jasa lingkungan	01 - Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan	2	30 Juta m ³	14.846,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01.02.02.02 Prop. Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	01 - Teriaksananya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	01 - Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya	5	40 Unit	179.772,2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01.02.03 KP : Penyediaan Air untuk Pertanian	01 - Meningkatkan penyediaan air untuk pertanian	01 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	17.860 Ha	9.208.282,0	
01.02.03.01 Prop. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Teriaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	2	16.860 Ha	9.155.787,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
01.02.03.02 Prop. Pembangunan Sistem Penyediaan Air untuk Komoditas Pertanian Bermula Ekonomi Tinggi	01 - Teriaksananya sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bermula ekonomi tinggi	02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	2	51.400 Ha		
01.02.04 KP : Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	01 - Meningkatkan penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	01 - Luas lahan komoditas pertanian bermula ekonomi tinggi beririgasi	2	1.000 Ha	52.494,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
01.02.04.01 Prop. Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Meningkatkan penyediaan air baku untuk pengamanan air baku dan air tanah	01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2	87,37 m ³ /detik	1.060.388,4	
01.02.05 KP : Pemeliharaan, Pemulhan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	01 - Meningkatkan pemeliharaan, pemulhan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	01 - Tambahan penyediaan air baku	2	3,5 m ³ /detik	1.060.388,4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
01.02.05.01 Prop. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	01 - Teriaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	01 - Peningkatan tutupan hutan	2	385.000 Ha	1.243.689,7	
		01 - Luas hutan dan lahan yang terrehabilitasi secara nasional	2	385.000 Ha	926.309,8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.1.5-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahana Presiden	TARGET	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.03.01.01 ProP : Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	01 - Terlaksananya peningkatan diversifikasi konsumsi pangan	01 - Jumlah produksi ubi kayu	5	21,23 Juta Ton	554.227,4	Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian
		02 - Jumlah produksi ubi jalar	5	2,1 Juta Ton		
01.03.01.02 ProP : Peningkatan Keamanan Pangan	01 - Terlaksananya peningkatan keamanan pangan	01 - Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPK dan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditetapkan	5	91 Persen	307.028,5	Kementerian Pertanian
01.03.01.03 ProP : Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan	01 - Penelitian dan pengembangan biofortifikasi pangan	5	1 Varietas	56.225,0	Kementerian Pertanian
01.03.02 KP : Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut secara Berkelanjutan		01 - Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan, dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	5	65 Persen	5.671.645,8	
		02 - Ketersediaan beras	5	42,7 Juta Ton		
		03 - Ketersediaan protein hewani	5	2,6 Juta Ton		
		04 - Produksi jagung	5	31,9 Juta Ton		
		05 - Produksi daging	5	4,2 Juta Ton		
		06 - Produksi umbi-umbian	5	24,6 Juta Ton		
		07 - Produksi sayuran	5	16,2 Juta Ton		
		08 - Produksi buah-buahan	5	23,12 Juta Ton		
01.03.02.01 ProP : Peningkatan Produksi Padi	01 - Terlaksananya peningkatan produksi padi	01 - Peningkatan produksi padi	5	5,67 Persen	1.842.268,0	Kementerian Pertanian
01.03.02.02 ProP : Peningkatan Produksi Jagung	01 - Meningkatkan produksi jagung	01 - Peningkatan produksi jagung	5	3,4 Persen	1.484.860,7	Kementerian Pertanian
01.03.02.03 ProP : Peningkatan Produksi Kedelai	01 - Meningkatkan produksi kedelai	01 - Peningkatan produksi kedelai	5	7,08 Persen	185.503,3	Kementerian Pertanian
01.03.02.04 ProP : Peningkatan Produksi Daging	01 - Meningkatkan produksi daging	01 - Peningkatan produksi daging	5	5,28 Persen	1.459.175,9	Kementerian Pertanian
01.03.02.05 ProP : Peningkatan Produksi Hortikultura	01 - Meningkatkan produksi hortikultura	01 - Peningkatan produksi sayur-sayuran	5	2,70 Persen	699.837,9	Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan produksi buah-buahan	5	4,30 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-A.1.6-

FN/FP/KP/Prop	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah-an Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
01.03.03 KP : Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	01 - Meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	01 - Teknologi yang diterapkan oleh petani	5	70-80 Persen	1 108 438,9		
				02 - Nilai tambah per tenaga kerja pertanian			51,7 Juta Rp/Tenaga Kerja/Tahun
01.03.03.01 Prop Asuransi Pertanian	01 - Terlaksananya asuransi pertanian	01 - Jumlah asuransi usaha tani padi	5	1 000 000 Hektare	177 680,0	Kementerian Pertanian	
				02 - Jumlah asuransi usaha peternak sapi/kerbau			150 000 Ekor
01.03.03.02 Prop Pendidikan Pertanian	01 - Terlaksananya pendidikan pertanian	01 - Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian	5	75 persen	260 339,2	Kementerian Pertanian	
				01 - Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan sekolah lapang			65 Persen
01.03.03.04 Prop Korporasi Petani	01 - Berkembangnya korporasi petani	02 - Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	5	19 Persen	492 450,5	Kementerian Pertanian	
				01 - Jumlah korporasi petani			33 Korporasi Petani
01.03.04 KP : Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	01 - Meningkatkan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian	01 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	5	65 Persen	2 851 751,0		
				02 - Jumlah varietas unggul tanaman untuk pangan yang dilepas			30 Varietas Unggul Baru dan Galur
				03 - Jumlah varietas unggul hewan untuk pangan yang dilepas			8 Varietas Unggul Baru dan Galur
				04 - Sumber daya genetik dan hewan sumber pangan yang terindungi/tersedia			4250 Akses
01.03.04.01 Prop Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya air pertanian	01 - Indeks pemenuhan lahan pertanian yang mendapat pengairan	5	34,35 Persen	507 457,9	Kementerian Pertanian	
01.03.04.02 Prop Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya lahan pertanian	01 - Indeks ketersediaan lahan pertanian	5	65,84 Nilai	2 344 293,1	Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Desa PDTT	
				02 - Indeks keberlanjutan lahan pertanian			99,84 Nilai
01.03.05 KP : Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	01 - Terlaksananya peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	01 - <i>Global Food Security Index</i>	5	65,5 Nilai	9 077 398,6		
				01 - Terlaksananya stabilisasi harga pangan strategis			2,0 Persen
01.03.05.01 Prop Stabilisasi Harga Pangan	01 - Terlaksananya stabilisasi harga pangan strategis	01 - Koefisien Variasi Harga Pangan	5	2,0 Persen	61 869,9	Kementerian Pertanian	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.1.7-

PM/PP/EP/Prop	Sasaran	Indikator	Dahsyat terhadap Araban Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Istana Pelaksana
01.03.05.02 Prop : Penanganan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	01 - Terlaksananya penanganan rawan pangan serta cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	01 - Persentase daerah rentan rawan pangan	5	16 Persen	9.015.528,7	Kementerian Pertanian, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
		02 - Cadangan pangan nasional	5	2,0 Juta Ton		
01.04 PP : Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	01 - Meningkatkan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	01 - Konservasi kawasan kelautan	5	24,60 Juta Ha	1.551.225,3	
		02 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasasi biologis yang aman	5	≤67 Persen		
		03 - Produksi perikanan	5	27,55 Juta Ton		
		04 - Produksi garam	5	3,10 Juta Ton		
		05 - Nilai Tukar Nelayan (NTN)	5	102-104 Nilai		
01.04.01 KP : Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut	01 - Meningkatkan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	01 - Pengelola WPP	5	11 Unit	44.546,0	
		02 - Akurasi pendataan stock dan pemanfaatan WPP	4	11 WPP		
		03 - Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	22 RZ		
01.04.01.01 Prop : Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Terlaksananya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Jumlah model percontohan penguatan tata kelola WPP	4	5 WPP	24.432,6	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.01.02 Prop : Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	01 - Terlaksananya penataan ruang laut dan Rencana Zonasi Pesisir	01 - Jumlah KSN dan KSNY yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNY dan antarwilayah laut	5	22 RZ	16.500,0	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.01.03 Prop : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01 - Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang laut	01 - Jumlah pengendalian pemanfaatan ruang laut dan reklamasi	5	9 Lokasi	3.613,4	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.02 KP : Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	01 - Meningkatkan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	01 - Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	5	10 Kawasan	23.836,7	
01.04.02.01 Prop : Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim	01 - Terlaksananya pengembangan wisata bahari dan jasa maritim	01 - Jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang terkelola	5	6 kawasan	20.186,7	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.02.02 Prop : Pengembangan Marne Bioproduct dan Bioteknologi	01 - Terlaksananya pengembangan marne bioproduct dan bioteknologi	01 - Jumlah bioteknologi dan biofarmakologi yang dikembangkan	5	8 Paket	3.650,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.1.8-

PN/PP/KP/Prop	Sasaran	Indikator	Dukung terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.04.03 KP : Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	01 - Meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	01 - Produksi ikan	5	16,0 Juta Ton	1.205.057,1	
		02 - Produksi rumput laut	5	11,55 Juta Ton		
01.04.03.01 Prop. Peningkatan Produksi Perikanan	01 - Meningkatkan produksi perikanan	01 - Produksi ikan tangkap	5	8,08 Juta Ton	944.145,9	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Produksi ikan budidaya	5	7,92 Juta Ton		
01.04.03.02 Prop Peningkatan Produksi Rumput Laut	01 - Meningkatkan produksi rumput laut	01 - Jumlah produksi rumput laut	5	11,55 Juta Ton	36.900,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.03.03 Prop : Peningkatan Produksi Garam	01 - Meningkatkan produksi garam	01 - Jumlah produksi garam	5	3,1 Juta Ton	122.797,3	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.03.04 Prop : Karantina Ikan dan Jaminan Mutu	01 - Terlaksananya karantina ikan dan jaminan mutu	01 - Persentase pencegahan impor, ekspor, antararea jenis ikan yang dilarang, diindungi dan dibatasi	5	90 Persen	101.213,9	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		01 - Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil	5	Rp3,3 Triliun		
01.04.04 KP : Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	01 - Meningkatkan fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	03 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTP)	5	102 Indeks	95.665,9	
		01 - Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang terlindungi	5	125.000 orang		
01.04.04.01 Prop. Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	01 - Meningkatkan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan	01 - Sertifikasi tanah nelayan dan lahan budidaya	5	20.500 Bidang	51.308,1	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.04.02 Prop : Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan akses pembiayaan usaha perikanan	01 - Integrasi sistem perizinan pusat-daerah kelautan dan perikanan	4	34 Provinsi	19.257,8	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.04.03 Prop : Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penataan perizinan kelautan dan perikanan	01 - Jumlah hasil riset yang diadopsi/diterapkan	5	8 Hasil Riset	182.119,6	
01.04.05 KP : Peningkatan SDM dan Riset Kemarifatan dan Kelautan Serta Database Kelautan dan Perikanan	01 - Meningkatkan SDM dan riset kemarifatan dan kelautan serta database kelautan dan perikanan					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.I.9-

PM/PP/KP/Prop	Basaran	Indikator	Dakwaan terhadap Arahan Presiden	TARGET	Alokasi (Rp. Juta)	Institusi Pelaksana
01.04.05.01 Prop. Peningkatan SDM kelautan dan Perikanan	01 - Teriaksananya peningkatan SDM kelautan dan perikanan	01 - Jumlah masyarakat yang disuluh	1	410.000 Orang	141 226,6	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.05.02 Prop. Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	01 - Teriaksananya penguatan inovasi teknologi dan riset kelautan dan perikanan	01 - Jumlah riset kemaritiman dan kelautan	5	26 Hasil Riset	40 893,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.05 PP : Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	01 - Menguatnya kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi	01 - Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 02 - Pertumbuhan wirausaha 03 - Kontribusi koperasi terhadap PDB	5 5 5	26,50 Persen 2,50 Persen 5,20 Persen	1 301 800,1	
01.05.01 KP : Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	01 - Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	01 - Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil) yang menjalin kemitraan	5	9 Persen	241 294,9	
01.05.01.01 Prop. Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk	01 - Teriaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan kapasitas usahanya	5	7990 UMKM	223 449,9	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kementerian Perdagangan
01.05.01.02 Prop : Perluasan Kemitraan Usaha	01 - Teriaksananya perluasan kemitraan usaha	01 - Jumlah UMKM yang diperluas cakupan kemitraannya	5	777 UMKM	11 308,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.05.01.03 Prop. Penguatan Kapasitas kelembagaan untuk Bermitra	01 - Teriaksananya penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra	01 - Jumlah UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya	5	500 UMKM	6.537,0	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.02 KP : Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	01 - Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	01 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 02 - Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit 03 - Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi	5 5 5	20,3 Persen 2,8 Persen 65 Persen	199 769,1	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.1.10-

PM/PP/KP/Prop	Sasaran	Indikator	Dalamnya terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.05.02.01 Prop. Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha	01 - Terlaksananya dukungan pemberian modal awal usaha	01 - Jumlah wirausaha pemula yang mendapat modal usaha	5	6.900 Orang	178.942,1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.02.02 Prop. Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit	01 - Terlaksananya pendampingan UMKM untuk mengakses kredit	01 - Jumlah UMKM yang didampingi mengakses kredit/pembiayaan	5	10000 UMKM	17.811,2	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian
01.05.02.03 Prop. Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM	01 - Terlaksananya pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan skema pembiayaannya	5	850 UMKM	3.015,8	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.03 KP : Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	01 - Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	5	75 Koperasi	44.825,0	
01.05.03.01 Prop. Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi koperasi	01 - Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	5	2.300 Orang	16.775,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.03.03 Prop. Pengembangan Jangkauan dan Cakupan Usaha	01 - Terlaksananya pengembangan jangkauan dan cakupan usaha kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan jangkauan dan cakupan usahanya	5	525 Koperasi	13.750,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.03.04 Prop. Pengembangan Inovasi Koperasi	01 - Terlaksananya pengembangan inovasi kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan untuk berinovasi	5	225 Koperasi	8.800,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.03.02 Prop. Pendampingan Kelompok untuk Membentuk Koperasi	01 - Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk koperasi	01 - Jumlah orang/masyarakat yang didampingi membentuk koperasi	5	3000 Orang	5.500,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.04 KP : Peningkatan Penciptaan Start-up dan Peluang Usaha	01 - Meningkatkan penciptaan start-up dan peluang usaha	01 - Jumlah Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	5	1.650 WUB	810.811,1	
		02 - Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri	5	18,8 Persen		
		03 - Penumbuhan start-up	5	700 Start-Up		
01.05.04.01 Prop. Pelatihan Kewirausahaan	01 - Terlaksananya pelatihan kepada wirausaha atau calon wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang dilatih	5	82.400 Orang	559.149,3	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.I.11-

PM/PP/KP/Prop	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah-an Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.05.04.02 Prop Inkubasi Usaha	01 - Terlaksananya inkubasi kepada wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang dimiliki	5	200 Orang	160.400,0	Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian
01.05.04.03 Prop : Penguatan Kapasitas Layanan Usaha	01 - Terlaksananya layanan pengembangan Usaha kepada UMKM	01 - Jumlah UMKM yang mendapat layanan usaha	5	7170 UMKM	47.455,8	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.04.04 Prop Pengembangan Sentra Industri kecil dan Menengah	01 - Terlaksananya pengembangan sentra Industri kecil dan Menengah	01 - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	5	20 Sentra IKM kumulatif	43.806,0	Kementerian Perindustrian
01.05.05 KP : Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	01 - Meningkatkan nilai tambah usaha sosial	01 - Kontribusi usaha sosial	5	2,1 Persen PDB	5.100,0	
01.05.05.01 Prop Pembinaan Wirausaha Sosial	01 - Terlaksananya pembinaan wirausaha sosial	01 - Jumlah lembaga yang membina wirausaha sosial	5	44 Lembaga	5.100,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.06 PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Ruri, dan Industrialisasi	01 - Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor ruri, dan industrialisasi	01 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 02 - Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 03 - Nilai tambah ekonomi kreatif 04 - Jumlah tenaga kerja industri pengolahan 05 - Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja 06 - Jumlah tenaga kerja parawisata 07 - Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif 08 - Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/EODB 09 - Nilai realisasi PMA dan PMDN 10 - Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan	5 5 5 1 1 1 5 5	4,75-5,54 Persen 17,63-17,84 Persen Rp1.277,00 Triliun 18,35 Juta Orang 14,00 Persen 14,30 Juta Orang 17,90 Juta Orang Menuju Peringkat 40 Rp858,50 Triliun Rp268,70 Triliun	15.519.229,6	
01.06.01 KP : Peningkatan Industri Pengolahan Beras Padi, Perikanan, Kematihan, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	01 - Meningkatkan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir	01 - Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman 02 - Pertumbuhan PDB perkebunan 03 - Peningkatan produksi kakao	5 5 5	5,00-5,50 Persen 5 Persen 2,3 Persen	2.255.765,1	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.1.12-

PW/PP/KP/Prop	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah-an Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana	
				04 - Peningkatan produksi kopi	5	1,5 Persen	
				05 - Peningkatan produksi kelapa sawit	5	5,9 Persen	
				06 - Pertumbuhan PDB hortikultura	5	5,8 Persen	
01.06.01.01	01 - Teriaksananya pengembangan industri berbasis perkebunan		5	0,78 Juta Ton	1.191.326,9	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	
			5	0,76 Juta Ton			
			5	3,63 Juta Ton			
			5	2,98 Juta Ton			
01.06.01.02	01 - Teriaksananya pengembangan industri berbasis pertanian pangan		5	1,35 Persen	798.759,1	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan	
01.06.01.03	01 - Teriaksananya pengembangan industri berbasis kehutanan		5	4,00-5,00 Persen	18.473,1	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
01.06.01.04	01 - Teriaksananya pengembangan industri kemaritiman		5	8,11 Persen	209.792,8	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan	
01.06.01.05	01 - Teriaksananya pengembangan industri kimia, farmasi dan logam		5	6,00-7,25 Persen	37.413,2	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan	
01.06.02	KP : Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa		5	5 KI - KEX Industri	6.678.000,8		
01.06.02.01	01 - Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa		5	5,00 - 6,25 Persen	6.655.936,3	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertubuhan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika	
01.06.02.02	01 - Teriaksananya pemanfaatan mineral dan batubara untuk meningkatkan nilai tambah		2	73,53 Persen	22.064,5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	